

PERAN DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN DAYA BELI PRODUK EKONOMI KREATIF KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Jeff Franklyn Luis Ginting
NPP. 29.1764

*Asdaf Kota Jayapura, Provinsi Papua
Program Studi Pembangunan Ekonomi
Fakultas Politik Pemerintahan*

Email: luisginting2000@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): This research was conducted to analyze how the role of the Tourism Office in Improving the Buying Power of Creative Economy Products in Jayapura City, Papua Province. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the role of the Tourism Office in Improving the IDX Power of Creative Economy Products in Jayapura City, Papua Province, the supporting and inhibiting factors as well as the efforts to be made. **Method:** This research uses the method qualitative research, data collection techniques with interviews, observation, and documentation study **Result:** The results of this research are the role of the tourism office in increasing the purchasing power of economic products Creative has been going quite well, this is supported by conditions Jayapura City area which is rich in social potential, good social conditions support, and central government support for development creative economy in Indonesia. **Sugegestion:** However, there are several obstacles, such as the lack of understanding from each element of the government, the absence of a special room, and the lack of even teamwork. The suggestions proposed in this study are, to disseminate information to the community as well as to promote (offline and online) the results of handicrafts that have been made so as to attract consumer interest, provide facilities such as in parks so that people can introduce themselves to the results of handicrafts that have been made. , and made a proposal to the government to create a special place to sell souvenirs typical of the City of Jayapura.

Keywords: *Purchasing Power, Creative Economy, Role*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa bagaimana Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Daya Beli Produk Ekonomi Kreatif Kota Jayapura Provinsi Papua. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Daya Beli Produk Ekonomi Kreatif Kota Jayapura Provinsi Papua, faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya yang akan dilakukan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. **Hasil/Temuan:**

Adapun hasil dari penelitian ini adalah peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Daya Beli Produk Ekonomi Kreatif sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini didukung dengan kondisi daerah Kota Jayapura yang kaya akan potensi sosial, kondisi sosial yang mendukung, dan dukungan pemerintah pusat atas pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. **Kesimpulan dan Saran:** Namun, terdapat beberapa hambatan seperti, masih rendah pemahaman dari tiap unsur pemerintah, belum tersedia ruang khusus, dan minimnya bahkan tidak adanya kerjasama tim. Saran saran yang diusulkan dalam penelitian ini yaitu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus promosi (offline dan online) hasil dari kerajinan yang telah dibuat sehingga menarik jiwa minat konsumen, menyediakan fasilitas seperti di taman taman agar masyarakat dapat memperkenalkan sendiri hasil dari kerajinan tangan yang telah dibuat, dan membuat usulan kepada pemerintah untuk membuat tempat khusus untuk menjual oleh-oleh khas Kota Jayapura.

Kata Kunci: *Daya Beli, Ekonomi Kreatif, Peran*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia kaya akan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tak terbatas. Kekayaan sangat beragam mulai dari kekayaan alam hingga keragaman budaya yang dimiliki, sehingga hal ini mengundang berbagai negara untuk berkunjung ke Indonesia sebagai tempat berwisata. Daya tarik dari berbagai potensi wilayah pedalaman Indonesia yang indah, hingga keberagaman budaya dan sisa jejak reruntuhan sejarah yang sangat menarik berdampak pada Indonesia berhasil meningkatkan intensitas wisatawan asing ke Indonesia setiap tahunnya. Namun peningkatan tersebut masih kalah dengan jumlah turis yang berkunjung ke beberapa negara lainnya. Menurut Undang Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa Pariwisata berperan sangat penting dalam perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan nasional untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkaya budaya bangsa dan memantapkan pembangunan dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan negara. mempererat tali persaudaraan antar bangsa. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tercermin dari tujuan pembangunan ekonomi yang semula ditujukan pada pertumbuhan berkelanjutan dari ekonomi skala besar, kini menjadi prioritas pembangunan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2009 tentang mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Dengan dukungan ini diharapkan dapat lebih meluas lagi kepada para perajin ekonomi kreatif, sehingga dapat berdampak nyata bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 mengenai ekonomi kreatif yang menyatakan ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang berakar dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi, dan bertujuan agar memaksimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berdasarkan peninggalan seni dan budaya, pengetahuan, serta teknologi. Ekonomi kreatif adalah suatu konsep ekonomi dimana mengutamakan sistem data, kreativitas, dan mengandalkan inspirasi berdasarkan bermacam pengetahuan tentang sumber daya manusia (SDM) sebagai aspek kunci dari ekonomi. Kreativitas dapat dipadukan dengan nilai seni, teknologi, intelektual, dan budaya yang

menjadi dasar untuk ikut serta dalam persaingan ekonomi, sehingga muncullah apa yang disebut ekonomi kreatif sebagai solusi pengganti pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Ekonomi kreatif didorong oleh kreativitas permodalan dan dorongan untuk menciptakan produk dan jasa dengan tingkat kreativitas yang tinggi untuk input dan output kegiatan ekonomi. (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2010). Ekonomi kreatif sangat berhubungan dengan penciptaan, produksi serta pendistribusian produk yang dihasilkan oleh pengrajin, mulai dari rancangan awal hingga penyelesaian produk. Secara keseluruhan, aktivitas ekonomi kreatif ini membawa manfaat diantaranya untuk mengurangi tingkat angka pengangguran dan kemiskinan. Sementara itu, secara khusus juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal didaerah setempat. Dengan memberikan hak dan wewenang didasari otonomi daerah, pengelolaan pariwisata diserahkan ke daerah. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah Kota Jayapura membentuk dinas pariwisata Kota Jayapura guna merumuskan kebijakan yang bersifat teknis dan evaluasi terkait obyek wisata di Kota Jayapura. Salah satu peran dinas pariwisata dalam mengembangkan potensi objek wisata adalah menjadi koordinator. Koordinator dimaksud adalah untuk mengatur dan mengkonseptualisasikan kegiatan promosi pariwisata dan pemasaran pariwisata dalam rangka mengembangkan potensi objek wisata. Adanya pariwisata yang sudah dikembangkan oleh pemerintah pusat serta wilayah bisa membagikan kontribusi terhadap kenaikan perkembangan ekonomi penduduk. Perihal itu tentunya akan menambah kesejahteraan warga di dekat lokasi pariwisata dan membagikan keuntungan untuk pemerintah pusat dan daerah. Namun pada kasus dilapangan, potensi dari pariwisata tersebut belum dapat dioptimalkan dengan maksimal. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada, serta produk atau layanan diberikan tidak memenuhi standar dapat berakibat kurangnya minat wisatawan terhadap tempat wisata, hal ini menyebabkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki keharusan dalam membuat rencana strategis dalam pengolahan pariwisata. Salah satu dari strategi dalam pengembangan pariwisata yaitu dengan mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat setempat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Masih lemahnya kerjasama dengan pihak swasta menjadi salah satu problematika yang dihadapi dinas pariwisata Kota Jayapura, khususnya terkait dengan promosi objek wisata alam yang belum banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan demikian, keberadaan industri pariwisata yang maju dapat mensejahterakan penduduk Kota Jayapura dan menjadi agen industri pariwisata dengan menjual barang dan jasa yang diperlukan kepada para wisatawan yang berkunjung ke sana.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama Etty Ratnawati dan Nasehudin (2019) Peran Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam Memberdayakan Ekonomi Kreatif Masyarakat. Metode Penelitian Metode Kualitatif. Hasil penelitian Peran pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam memberdayakan ekonomi kreatif masyarakat telah dilakukan baik dalam kebijakan maupun secara taktis dengan melibatkan komponen masyarakat lain. Penelitian yang kedua Makmun dan Rifki Ismayadi Sidik (2019) Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak Dalam Meningkatkan Ekonomi

Kreatif Berbasis Wisata Budaya Pada Suku Pedalaman Baduy Iuar Metode penelitian Kualitatif. Hasil penelitian: Adanya hambatan yaitu jumlah sumber daya manusia masih terlihat minim, tantangan untuk Pemerintah untuk memberi sentuhan tanpa mengubah budaya. Penelitian ketiga Rosmawaty Sidaruk (2003) Dengan judul Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Barat. Menggunakan metode penelitian Evaluasi Formatif. Hasil penelitian menunjukkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membuat peraturan daerah dan cetak biru ekonomi kreatif Permasalahan yang ada yaitu: terdapat kesulitan dalam membedakan subsektor ekonomi kreatif dengan sektor lainnya dan penganggarannya menurut ekonomi kreatif, Perijinan dan modal penganggarannya belum berjalan optimal serta daya dukung riset terhadap ekonomi kreatif masih kurang.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Daya Beli Produk Ekonomi Kreatif Kota Jayapura Provinsi Papua.

II. METODE

Penelitian adalah sebuah mekanisme mencari suatu kebenaran secara sistematis dalam suatu kurun waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah berdasarkan aturan-aturan tertentu. peneliti dapat memberikan penjelasan dan maksud dari metode deskriptif dengan pendekatan induktif ialah suatu upaya dalam penelitian yang memberikan deskripsi yang jelas sesuai dengan fakta yang awalnya terlihat lebih khusus kemudian dapat diambil sebuah kesimpulan dari sebuah hasil pengamatan suatu fenomena yang bersifat lebih umum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan induktif. Menurut Carsel (2018:77) pendekatan induktif adalah “prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum” pendapat lain juga dipaparkan pendekatan induktif ini lebih memfokuskan pada pengamatan dan diproses berdasarkan permasalahan yang ada sehingga dapat menarik kesimpulan dari data yang ditemukan dilapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Daya Beli Produk Ekonomi Kreatif Kota Jayapura Provinsi Papua.

Peran secara umum diartikan bahwa suatu individu yang sedang melaksanakan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban memiliki sifat ketergantungan antara satu dengan yang lainnya ataupun sebaliknya. Masing-masing orang mempunyai peranan tersendiri dalam menjalankan peran pada pola hidupnya. Hal ini menjelaskan bahwa peranan sangat menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat sekitar dan kesempatan apa yang

diberikan dari masyarakat kepadanya. Menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai “orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.” Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Menurut Soekanto (2002:243) Peranan adalah “aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.” Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Saat seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Dalam tata kelola Pemerintahan Daerah Kota Jayapura, peran dan fungsi dari Dinas Pariwisata ialah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas untuk membantu Walikota dalam mengelola dan menjalankan ekosistem pemerintahan dibidang pariwisata dan baru-baru ini mulai merambak ke bidang ekonomi kreatif sehingga potensi yang dimiliki oleh Kota Jayapura tersebut dapat didistribusikan dan terkelola secara optimal demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang Dukungan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dukungan ini diharapkan untuk lebih berkembang kearah pengrajin ekonomi kreatif, sehingga akan berpengaruh secara nyata terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia tercermin pada sasaran pembangunan ekonomi yang pada awalnya berorientasi pada pertumbuhan yang berkelanjutan dari ekonomi skala besar kini menjadi prioritas pembangunan dimasa yang akan datang. Untuk melihat bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata, Pitana dan Gayatri (2005: 95) dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi Pariwisata” mengatakan bahwa terdapat 3 peran utama pemerintah dalam mengembangkan pariwisata yang dalam hal ini terfokus pada pengembangan dibidang ekonomi kreatif berbasis kerajinan tangan. Adapun peran tersebut ialah:

a. Peran Pemerintah Sebagai Motivator

Berkaca pada potensi kekayaan daerah yang dimiliki oleh Kota Jayapura yang tidak hanya berada di bidang alamnya saja, namun juga berasal dari bidang sosial yang terkenal akan keunikan dan kekotisan budaya masyarakat Timur Indonesia

membuat Pemerintah Kota Jayapura mulai memfokuskan program percepatan peningkatan pariwisata dengan mengoptimalkan sektor industri kreatif di daerah mereka. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif. Dalam dasar kebijakan tersebut Pemerintah Daerah memahami bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan sektor ekonomi dan sebagai pencipta lapangan kerja dan potensi ekonomi kreatif di Kota Jayapura perlu dikembangkan secara optimal dan didukung melalui upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap pelaku ekonomi kreatif. Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pengeksploasian Ekonomi Kreatif dan potensinya perlu dilakukan secara sistematis, terstruktur, serta berkelanjutan. Yang dimaksud disini adalah ekonomi kreatif yang mengutamakan ide kreatif serta teknologi informasi dalam pengembangan kreativitas sesuai dengan sumber daya manusia yang ada. Kreativitas dimaksudkan sebagai nilai seni yang dapat memajukan ekonomi kreatif yang dapat menyejahterakan masyarakat pelaku ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif pada hakikatnya adalah kegiatan ekonomi yang mengutamakan pemikiran kreatif untuk menciptakan hal-hal baru dan berbeda yang bernilai. Dalam konteks ekonomi, kreativitas mengacu pada pengusulan ide-ide baru dan penerapan ide-ide tersebut ke dalam karya dari produk seni dan budaya, kreasi fungsional, penemuan ilmiah, dan aplikasi teknologi. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pengembangan bidang ekonomi kreatif di daerahnya sangat penting dan memegang fungsi yang sangat strategis. Hal ini mengingat bahwa pemerintah merupakan badan negara yang diamanahkan oleh segenap masyarakat yang mengelola dan mengembangkan, serta mengembangkan segala potensi yang ada di lingkungan tersebut. Sehingga peran pemerintah dalam memotivasi atau mendorong partisipasi multi sektor dalam pengembangan di bidang ekonomi kreatif, khususnya di bidang kerajinan tangan (kriya) akan sangat berdampak bagi peningkatan daya beli produk ekonomi kreatif di daerah Kota Jayapura. Menurut Pitana dan Gayatri (2005: 95), peran pemerintah sebagai motivator dalam pengembangan objek wisata ialah pemerintah seyogianya memotivasi, atau mendorong masyarakat atau pihak luar untuk dapat sama-sama membangun dan memajukan objek wisata tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mudjiono (2009: 80) bahwa motivator atau motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan pengarahaan perilaku manusia. Lebih jelas lagi, Sardiman (2007: 175) menjelaskan bahwa motivator atau motivasi mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan konsep tersebut, maka cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai motivator ialah dengan mengajak masyarakat untuk berkunjung ke objek wisata tersebut. Kemudian, dalam rangka mempercepat pembangunan dan kemajuan perpustakaan, pemerintah juga dapat mengajak pihak luar untuk sama-sama memajukan objek wisata yang ada di desanya. Adapun dalam sudut pandang lain, pemerintah juga dapat menetapkan peraturan guna memotivasi masyarakat dan pihak luar tersebut untuk dapat sama-sama

memajukan Kerajinan tangan seni kriya seperti noken, batik dan patung sebagai bagian dari ekonomi kreatif, setidaknya terdapat dua poin utama, yaitu

- 1) Peran pemerintah dalam memotivasi dan memberikan dorongan pemerintah kota jayapura dalam upaya pengembangan sektor pariwisata di bidang ekonomi kreatif, khususnya pada sub bidang kerajinan tangan seyogianya melakukan pendataan dan penganalisisan potensi-potensi budaya yang kemudian dapat di konversi menjadi suatu produk budaya berbasis kerajinan tangan, serta memberikan fasilitasi dan dinamisasi sehingga tidak terjadi stagnasi pasar sehingga hal ini dapat mendorong tumbuhnya pasar kerajinan tangan secara masif di daerah Kota Jayapura sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli produk ekonomi kreatif di Kota Jayapura. Menurut hasil pengamatan observasi yang dilakukan mengenai bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan kebijakan dan peningkatan ekonomi kreatif ditemui bahwa Dinas Pariwisata Kota Jayapura telah melaksanakan peran dengan semaksimal mungkin, hal ini meliputi dengan adanya pelatihan pelatihan yang dilakukan, pemberian bantuan untuk mendaftarkan produk ekonomi kreatif untuk membuat Hak Kekayaan Intelektual agar dapat lebih menunjang kegiatan ekonomi kreatif yang ada di Kota Jayapura. Pernyataan ini juga didukung dengan hasil data yang penulis dapatkan.
- 2) Memberi Pengenalan dan sosialisasi
Pengembangan industri ekonomi kreatif membutuhkan upaya yang sangat luar biasa, tersistematis, dan terkoordinasi secara menyeluruh, baik antar bidang di pemerintahan, sektor, swasta, dan juga yang paling utama ialah masyarakat. masyarakat Merupakan pelaku utama dalam menggerakkan roda ekonomi kreatif di daerahnya. Namun permasalahan utama yang kerap mengganggu laju roda ekonomi kreatif ialah disinformasi dan kegagalanpahaman masyarakat akan peluang yang dapat dioptimalkan melalui sektor ekonomi kreatif, khususnya sub bidang kerajinan tangan. Anggapan umum bahwa pelaku kerajinan tangan memiliki pasar yang sepi, ditambah gemboran produk asing yang membanjiri pasar dalam negeri, perlahan menggerus industri kerajinan tangan masyarakat lokal sehingga membuat banyak masyarakat yang mulai banting stir dan pindah haluan pada bidang ekonomi lain. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai support system seyogianya kerap memberikan pemahaman yang konprehensif kepada masyarakat bahwa industri ekonomi kreatif merupakan sektor basah yang kini mulai gencar di gaungkan oleh Pemerintah Indonesia. Sehingga melalui hal tersebut, diharapkan masyarakat menjadi lebih tenang dalam memproduksi produk kerajinan tangan berbasis budaya dan lebih percaya diri dalam mengembangkan produk kerajinan tangannya dalam rangka mendongrak perekonomiannya Pertumbuhan pelaku usaha dan komunitas kerajinan tangan di Kota Jayapura yang masif ini diharapkan dapat

mendongkrak ekosistem perekonomian masyarakat secara kondusif dan progresif. Sehingga melalui hal tersebut, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai serta eksistensi daerah Kota Jayapura dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang juga menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa UMKM yang terdaftar di Sub Bidang Ekonomi Kreatif berjumlah 71 UMKM yang berasal dari data Dokumentasi Dinas Pariwisata Kota Jayapura.

b. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah merupakan sebuah unit kenegaraan yang diamanahkan oleh masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas negara wajib menyediakan berbagai sarana dan fasilitas publik guna menunjang berbagai kegiatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kaitannya terhadap pengembangan ekonomi kreatif guna meningkatkan daya beli masyarakat atas produk ekonomi kreatif tersebut, maka pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kota Jayapura diharapkan dapat menyediakan berbagai sarana dan fasilitas penunjang guna meningkatkan kemampuan dan keahlian para pelaku usaha ekonomi kreatif sehingga melalui hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk yang mereka produksi yang selanjutnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat atas produk ekonomi kreatif tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Papua, mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Tugas Pokok dan Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas yang lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tujuan kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kota Jayapura untuk meningkatkan, mendayagunakan serta melestarikan produk ekonomi kreatif demi meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara serta memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar Kota Jayapura. Pitana dan Gayatri (2005: 95) mengatakan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator ialah pemerintah berperan untuk memfasilitasi segala kegiatan dan menunjang, serta mendukung segala hal yang diperlukan dalam pengelolaan peningkatan potensi yang dituju. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai fasilitator tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan bagi terciptanya kemandirian desa dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas dan

kesejahteraan masyarakat desa. berdasarkan pada konsep tersebut maka peran fasilitator pemerintah dapat meliputi 2 (dua) bagian, yaitu

1. Memfasilitasi aktivitas keterampilan pelaku ekonomi kreatif. Sebagai pelayan publik

Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pariwisata seyogianya menyediakan berbagai sarana dan prasarana penunjang aktivitas sosial masyarakat, guna mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki oleh daerah, dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kota Jayapura merupakan daerah yang memiliki berbagai potensi sosial budaya yang sangat tinggi dan unik di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah setempat seyogianya menjadi jembatan untuk lahir dan berkembang geliat perekonomian masyarakat dengan fasilitasi berbagai kegiatan penunjang dari aktivitas masyarakat tersebut. peran pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kota Jayapura guna memfasilitasi aktivitas kegiatan ekonomi kreatif masyarakat sudah cukup banyak. Seperti menyediakan ruang terbuka hijau bernama Taman Indie sebagai pusat keramaian bagi para masyarakat untuk berdiskusi, mengadakan kegiatan pameran atau festival budaya, dan lain sebagainya. Memberikan fasilitasi berupa pelatihan dan sosialisasi terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, hingga memberikan fasilitasi berupa pembuatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi para pelaku industri ekonomi kreatif agar setiap karyanya memiliki nilai yang jika diperjual belikan, para pencipta tersebut mendapat royalti atau bagi hasil dari produk yang merek ciptakan. Dukungan dan fasilitasi Pemerintah melalui Dinas Pariwisata guna mendukung tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif di daerah Kota Jayapura di kukuhkan dalam Nomenklatur Bidang Ekonomi Kreatif Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050.3708 Tahun 2020 pemuktahirannya, dimana dalam peraturan tersebut tersusun berbagai macam program guna mendukung sektor pariwisata dan bidang ekonomi kreatif.

2. Menyediakan sarana dan prasaranan atau bantuan modal

Fasilitasi di bidang pengadaan barang atau objek secara fisik juga sangat penting dalam mempercepat kemajuan dan pengembangan dari sektor ekonomi kreatif. Sehingga melalui fasilitasi tersebut diharapkan para pelaku usaha, komunitas, serta para calon konsumen dapat saling berinteraksi sehingga peningkatan daya beli atas produk ekonomi kreatif di Kota Jayapura dapat meningkat. melalui peran pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kota Jayapura guna memfasilitasi kegiatan ekonomi kreatif masyarakat Kota Jayapura belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah setempat belum menyediakan ruang khusus untuk menjajakan berbagai produk ekonomi kreatif masyarakat untuk selanjutnya di tawarkan kepada calon pembeli. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura dikarenakan minimnya alokasi anggaran akibat bidang yang masih baru dan refocusing anggaran sehingga pengadaan ruang atau tempat tersebut menjadi belum terealisasi. Namun walaupun demikian, Dinas Pariwisata Kota Jayapura kerap

mengusulkan kepada pemerintah untuk mengadakan ruang tersebut sehingga harapannya melalui pusat oleh-oleh yang menjajakan berbagai produk ekonomi kreatif masyarakat, hal ini dapat meningkatkan daya beli produk ekonomi kreatif di Kota Jayapura.

c. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Pemerintah sebagai role model dan motor penggerak ekosistem kehidupan berbangsa dan bernegara berkewajiban untuk memastikan kondisi masyarakat yang dibinanya berjalan secara kondusif, aman, dan terus maju menuju ke arah yang lebih baik dari hari sebelumnya. Oleh karena itu, Pemerintah diberi kekuasaan oleh dasar hukum konstitusional negara Indonesia, yang berbunyi bahwa seluruh hasil alam di Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah seyogianya mampu untuk menggerakkan partisipasi multi sektoral guna menghidupkan kembali jantung aktivitas masyarakat kala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan. Pitana dan Gayatri (2005: 95) mengatakan bahwa dalam pilar good governance pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat harus bersinergi dengan baik agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal. Pemerintah daerah sebagai salah satu stake holder pembangunan memiliki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan daerahnya. Selanjutnya Arif dalam Tahir dkk. (2014: 69) mengatakan bahwa peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Lebih jauh Arif dalam Tahir (2014, 69) mengatakan sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat. Berdasarkan pada konsep tersebut di atas, maka aktualisasi dalam peran dinamisator pemerintah terdapat 2 hal utama, yakni:

1. Membangun kerja sama antar pemerintah, swasta dan masyarakat

Dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang baik, maka salah satu pilar utama dalam menyangka roda pemerintahan agar tetap berjalan secara harmonis, sinergis, dan progresif ialah koordinasi. Koordinasi diartikan sebagai jembatan penghubung antar multi sektoral guna mencapai tujuan bersama. Hal ini mengingat bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri. Sama halnya dengan badan pemerintah, segala program, dan tujuan dari pemerintahan tersebut tidak dapat berjalan secara optimal jika tidak didukung oleh partisipasi dari berbagai golongan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sebagai inisiator harus mengsinkronkan dan menjalin kerja sama yang harmonis antar masyarakat, dan pihak swasta agar segala tujuan baik yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal.

2. Memberikan pelatihan kepada masyarakat

Pelatihan merupakan salah satu aspek utama dalam mendongkrak kemajuan, dan pengembangan SDM. Oleh karena itu, pelatihan merupakan salah satu agenda wajib dari pemerintah untuk masyarakat sehingga hal ini dapat meningkatkan kemampuan, pemahaman, serta kualitas SDM masyarakat tersebut. Pihak Dinas Pariwisata melakukan program aktivitas pendukung untuk kegiatan ekonomi kreatif seperti, Monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem EKRAF, Diklat, BIMTEK dan Profesional 17 Sub Sektor EKRAF, Basic Training dan Workshop EKRAF, dan Sertifikasi Profesional Dan Usaha. Produk EKRAF. dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif di daerahnya telah merancang berbagai agenda strategis guna mengembangkan ekonomi kreatif melalui pengembangan SDM di Kota Jayapura. Hal ini juga disambut baik oleh pihak pelaku usaha dan para masyarakat selaku konsumen dari produk ekonomi kreatif di daerah Kota Jayapura. Dalam wawancara yang telah dilakukan, hasilnya menyimpulkan bahwa mereka amat senang atas dukungan dan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung usaha mereka. Namun disaat yang bersamaan pula mereka menyuarakan untuk dilakukan peningkatan agar 93 dapat lebih maksimal. Sehingga hal ini dapat menjadi batu loncatan dalam meningkatkan kualitas hasil produk guna meningkatkan daya beli terhadap produk ekonomi kreatif di daerah Kota Jayapura.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam meningkatkan daya beli produk ekonomi kreatif kota jayapura provinsi papua.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan daya beli produk ekonomi kreatif Kota Jayapura Provinsi Papua.

A. Faktor Pendukung

- a) Kondisi daerah Kota Jayapura yang kaya akan protensi sosial budaya yang kemudian membuat banyak ragam produk kebudayaan lahir di daerah tersebut.
- b) Kondisi sosial masyarakat yang amat mendukung pengembangan ekonomi kreatif, khususnya di sub bidang kerajinan tangan di daerah Kota Jayapura. Hal ini membuat ekosistem ekonomi kreatif dapat tumbuh subur dan berdampak pada peningkatan animo masyarakat atas daya beli produk ekonomi kreatif di Kota Jayapura.
- c) Dukungan Pemerintah Pusat atas pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, sehingga hal ini juga berimbas pada pemajuan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis kerajinan tangan di Kota Jayapura.

B. Faktor Penghambat

- a) Masih rendahnya pemahaman dari tiap unsur pemerintah terhadap ekonomi kreatif sehingga kerap terjadi miskonsepsi atas dalam implementasi kebijakan program pengembangan ekonomi kreatif tersebut.
- b) Belum tersedianya ruang khusus, seperti pusat oleh-oleh bagi pada pelaku usaha ekonomi kreatif dan komunitas berbasis kerajinan tangan untuk menjual berbagai produknya kepada pada konsume yang mencari berbagai produk ekonomi kreatif yang erat kaitannya dengan kebudayaan masyarakat setempat.
- c) Minim atau bahkan belum adanya kerjasama antara pihak Dinas Pariwisata Kota Jayapura dengan pihak swasta dalam rangka mendorong laju pertumbuhan dari ekonomi kreatif berbasis kerajinan tangan. Sehingga hal ini kemudian berdampak pada daya beli produk ekonomi kreatif di Kota Jayapura.

3.3 Upacara Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Daya Beli Produk Ekonomi Kreatif Kota Jayapura Provinsi Papua.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terdapat beberapa upaya Dinas Pariwisata dalam meningkatkan daya beli produk ekonomi kreatif Kota Jayapura Provinsi Papua ialah sebagai berikut:

1. Gencar melakukan promosi media dan event atau festival bertema ekonomi kreatif guna meningkatkan animo masyarakat terhadap industri ekonomi kreatif di Kota Jayapura.
2. Menyediakan ruang terbuka hijau yang bernama taman indie sebagai ruang berkumpulnya para komunitas anak muda dan masyarakat umum untuk bersantai dan mengadakan kegiatan lainnya.
3. Mengusulkan kepada pemerintah untuk mengadakan pusat oleh-oleh di daerah Kota Jayapura sebagai pasar pusat perbelanjaan dan ruang interaksi antar pelaku usaha dan pembeli sehingga hal ini dapat meningkatkan daya beli produk ekonomi kreatif di Kota Jayapura.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Kota Jayapura untuk meningkatkan mendayagunakan serta melestarikan produk ekonomi kreatif demi meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara serta memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar Kota Jayapura. peran pemerintah sebagai fasilitator ialah pemerintah berperan untuk memfasilitasi segala kegiatan dan menunjang, serta mendukung segala hal yang diperlukan dalam pengelolaan peningkatan potensi yang dituju. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai fasilitator tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan bagi terciptanya kemandirian desa dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat desa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lokasi magang pada Dinas Pariwisata Kota Jayapura melalui hasil wawancara serta data-data yang diperoleh selama penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Daya Beli Produk Ekonomi Kreatif Kota Jayapura Provinsi Papua, peneliti menggunakan teori Pitana dan Gayatri terdapat 3 peran utama pemerintah dalam mengembangkan pariwisata. Adapun peran tersebut yaitu: Peran pemerintah sebagai motivator, Peran pemerintah sebagai fasilitator, dan Peran pemerintah sebagai dinamisator. Peran Dinas Pariwisata memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh para UMKM dan memberikan hak hukum kepada mereka sehingga, jika nanti usaha mereka berkembang, usaha tersebut akan menjadi hak cipta mereka dan mendapatkan royalti jika bekerjasama dengan yang lain. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah juga sudah banyak seperti, ruang hijau terbuka. Sejauh ini Dinas Pariwisata sudah mendukung kegiatan ekonomi berbasis kerajinan tangan dan bekerjasama dengan pihak swasta walaupun hasilnya belum optimal. Banyak masyarakat yang setuju terhadap upaya pemerintah dalam memajukan usaha kerajinan tangan.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Daya Beli Produk Ekonomi Kreatif Kota Jayapura Provinsi Papua
 - A. Faktor pendukung
 - 1) Kondisi daerah Kota Jayapura yang kaya akan protensi sosial budaya yang kemudian membuat banyak ragam produk kebudayaan lahir di daerah tersebut.
 - 2) Kondisi sosial masyarakat yang amat mendukung pengembangan ekonomi kreatif.
 - 3) Dukungan Pemerintah Pusat atas pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.
 - B. Faktor Penghambat
 - 1) Masih rendahnya pemahaman dari tiap unsur pemerintah terhadap ekonomi kreatif sehingga kerap terjadi miskonsepsi atas dalam implementasi kebijakan program pengembangan ekonomi kreatif tersebut.
 - 2) Belum tersedianya ruang khusus.
 - 3) Minim atau bahkan belum adanya kerjasama antara pihak Dinas Pariwisata Kota Jayapura dengan pihak swasta.
3. Upaya Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Daya Beli Produk Ekonomi Kreatif Kota Jayapura Provinsi Papua:
 - a. Gencar melakukan promosi media dan event atau festival bertema ekonomi kreatif guna meningkatkan animo masyarakat terhadap industri ekonomi kreatif di Kota Jayapura
 - b. Menyediakan ruang terbuka hijau yang bernama taman indie sebagai ruang berkumpulnya para komunitas anak muda dan masyarakat umum untuk bersantai dan mengadakan kegiatan lainnya.

- c. Mengusulkan kepada pemerintah untuk mengadakan pusat oleh-oleh di daerah Kota Jayapura sebagai pasar pusat perbelanjaan dan ruang interaksi antar pelaku usaha dan pembeli sehingga hal ini dapat meningkatkan daya beli produk ekonomi kreatif di Kota Jayapura.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan refrensi Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Daya Beli Produk Ekonomi Kreatif Kota Jayapura Provinsi Papua.

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Daya Beli Produk Ekonomi Kreatif Kota Jayapura Provinsi Papua

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura Provinsi Papua beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A, Buku-buku:

- Ahmadi, Abu. 1982. *Psikologi Sosial*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Carsel, Syamsunie. 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan Dan Pendidikan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Creswell, Jhon W. 2016a. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, Jhon W. 2016b. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Yogyakarta: 2016.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2009. *Studi Industri Kreatif Indonesia 2009*. Jakarta: Departemen Perdagangan RI.
- Dewandaru, Bothy. 2016. "Strategi Dalam Mengajukan Industri Kreatif Dan Pengembangan Ekonomi Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata." *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 1(2).
- Fandeli. 1999. *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty.
- Hasan, Erliana. 2014. *Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Putong, Iskandar. 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurdin, Ismail. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: IPDN PRESS.

- Howkins, John. 2001. *The Creative Economy : How People Make Money from Ideas*. London: Penguin Press.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah. Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Marpaung. 2002. *Pengetahuan pariwisata Edisi Revisi*. Bandung: Alfa Beta.
- Mason. 2000. *Tourism Impact, Planning and Management*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pitana, I. Gede, and Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Simangungsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sinaga. 2010. *Potensi Dan Pengembangan Objek Wisata*. Medan: Kertas Karya.
- Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suswanto. 2007. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI Offset.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yoeti. 2002. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

B. KARYA ILMIAH

- Etty Ratnawati; Nasehudin. 2019. "Peran Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam Memberdayakan Ekonomi Kreatif Masyarakat " Jurnal. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Makmun dan Rifki Ismayadi Sidik. 2019. "Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Berbasis Wisata Budaya Pada Suku Pedalaman Baduy Luar". Jurnal. Lebak.
- Sidauruk, Rosmawaty. 2013. " Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat". Jurnal. Jawa Barat: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Bentuk dan Kedaulatan
Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata
Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 Tentang Dukungan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Gubernur Papua Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Papua

Peraturan Daerah Kota Jayapura No 9 Tahun 2002 Tentang Kepariwisata

D. SUMBER ONLINE

<https://jubi.co.id/pemkot-jayapura-berupaya-kembangkan-ekonomi-kreatif-masyarakat-di-kampung/>

<https://www.mkduncen.ac.id/noken-Papua-warisan-budaya-dunia-ini-potensi-ekonomi-kreatifnya/>

